



**PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL EKONOMI GUNA
MENCiptAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF**
(Studi tentang Penguatan Kerangka Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ekonomi di Era
Komunitas ASEAN)

Penulis¹:

Nurul Fajri Chikmawati, Evie Rachmawati Nur Ariyanti, dan Nelly Ulfah A.R.

Abstrak

Semangat ASEAN Community 2015 adalah terbentuknya suatu komunitas regional yang berorientasi terhadap kemajuan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur yang didasarkan kepada kerja sama yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Peningkatan kerja sama dalam kerangka investasi diharapkan membawa pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan meningkatnya peluang untuk perbaikan tingkat kesejahteraan. Sebagai negara yang multikultur, menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan konflik. Penyebab terjadinya konflik dapat berasal dari adanya kecemburuan sosial, persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan minimnya akses ke dalam aktivitas perekonomian. Namun masyarakat memiliki keunikan tersendiri dalam merespons perkembangan yang ada. Hal ini tergantung dari karakteristik modal sosial yang dimilikinya. Modal sosial itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan warga masyarakatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) kecamatan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang masing-masing mewakili karakteristik yang berbeda. Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengidentifikasi karakteristik modal sosial dan upaya pemanfaatan modal sosial yang ada untuk menyelesaikan konflik sosial ekonomi. Dengan modal sosial yang mengarah kepada tipologi Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*) dapat dioptimalkan dalam penyelesaian konflik sudah dapat dimulai dari upaya pencegahan terjadinya konflik melalui upaya penciptaan kondisi yang damai, aman dan tenteram dengan melakukan stimulasi terhadap unsur-unsur modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pencegahan konflik melalui mekanisme seperti ini sesuai dengan konsep *ASEAN Way* yang mengedepankan pendekatan sosiokultural dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Modal Sosial, Konflik, Investasi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagi Indonesia kerja sama ASEAN memegang peranan yang sangat penting dalam kerja sama internasional. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu kawasan di Asia Tenggara yang memiliki posisi strategis dan menjadi pilar utama pelaksanaan politik luar negeri

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas YARSI. Alamat surel: nurul.fajri@yarsi.ac.id

dalam bentuk capaian-capaian yang diraih dan sumbangsuhnya dalam penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Rasa saling percaya dan saling memahami karakteristik masing-masing negara di lingkungan sesama anggota ASEAN diharapkan dapat menjadi pilar pendukung terciptanya ASEAN Community 2015. Selanjutnya diharapkan terjalin kerja sama yang efektif di berbagai bidang baik dengan sesama anggota maupun dengan negara-negara mitra kerja sama global.

Daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi berkaitan erat dengan iklim investasi. Bila iklim investasi tidak baik maka daya tarik investasi menjadi tidak baik dan begitu juga sebaliknya. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam kegiatan investasi antara lain adalah memperhatikan keberadaan dunia usaha yang ada dengan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap Daerah. Dalam kerangka otonomi daerah diharapkan Daerah dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat lebih dengan lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi masuk ke daerah. Selain itu, dengan dilaksanakannya otonomi daerah berarti komitmen Indonesia terhadap perjanjian perdagangan di kawasan (ASEAN) dan perjanjian perdagangan internasional juga mengikat daerah otonom baik dari segi kebijakan yang dibuat maupun dalam praktiknya terhadap dunia usaha.

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki peluang investasi sangat besar². Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kawasan industri di kabupaten Bekasi berdampak juga pada meningkatnya kesempatan kerja. Hal ini dapat dirasakan tidak hanya oleh penduduk di sekitar kawasan, tetapi juga penduduk migrasi dari wilayah di luar Bekasi. Namun ternyata jumlah masyarakat sekitar kawasan (asli) yang terserap di industri besarnya tidaklah menggembirakan. Hal ini disebabkan kualitas sumber daya manusia tidak dapat memenuhi standar permintaan pasar kerja. Masalah lainnya adalah adanya konflik masyarakat dengan aparat setempat terkait dengan rencana-rencana pembangunan yang tidak tersosialisasi dengan efektif serta konflik horizontal atau antar masyarakat karena adanya perebutan hasil limbah pabrik yang ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kecemburuan sosial karena adanya perbedaan pendapatan dan status sosial dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan anggota masyarakat lainnya. Konflik-konflik seperti ini biasanya terjadi antara masyarakat asli daerah dengan komunitas masyarakat pendatang yang tinggal di daerah-daerah kawasan industri di Kabupaten Bekasi (Chikmawati, Hidayati, 2012). Konflik-konflik yang sifatnya vertikal dan horizontal seperti ini bila tidak segera diselesaikan dengan cepat dan tepat maka dapat mengganggu iklim investasi sehingga dapat mempengaruhi minat

²Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) provinsi Jawa Barat, hingga triwulan IV periode bulan Januari – Desember 2010 kabupaten Bekasi menduduki peringkat pertama dalam jumlah realisasi proyek PMA/PMDN, yaitu sebanyak 291 buah proyek atau sekitar 39,81% dari seluruh proyek yang ada dan 257 proyek merupakan PMA. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sejumlah 65.934 orang dan bekerja pada industri logam, mesin dan elektronik yang tersebar di berbagai tujuh kawasan industri.

investor/pengusaha untuk menanamkan modalnya dan menjalankan usaha di kabupaten Bekasi.

Pada masyarakat Indonesia, baik yang ada di perkotaan dan pedesaan, ada sebuah mekanisme pemecahan masalah yang telah turun-temurun dan mekanisme tersebut dapat ditemukan dalam keperangkatan, keperanataan atau kelembagaan dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat lokal. Sebagian dari keperangkatan, keperanataan dan nilai-nilai tersebut tumbuh dalam masyarakat yang didasarkan pada adat istiadat, sedangkan sebagian lainnya sengaja ditumbuh kembangkan oleh masyarakat sebagai wahana untuk menjawab berbagai macam kebutuhan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari keperangkatan itu dapat berupa organisasi-organisasi yang sifatnya informal, seperti kelompok-kelompok arisan dan simpan pinjam, perkumpulan atau paguyuban keluarga yang didasarkan kepada ikatan kedaerahan, majelis-majelis ta'lim. Keperanataan dapat terlihat dari adanya upacara-upacara dalam urusan kekeluargaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian. Keperangkatan dan keperanataan tersebut kemudian diikat dengan nilai-nilai sosial, seperti kebersamaan, toleransi, keterbukaan dan kesamaan hak, serta kearifan lokal yang sudah melembaga dengan baik terakumulasi menjadi suatu kekuatan yang disebut sebagai modal sosial (Suradi, 2006). Modal sosial ini mampu membentuk jaringan yang sinergis sebagai wahana untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang mengganggu ketahanan sosial dan keamanan masyarakat khususnya di kawasan pedesaan yang sedang mengalami perubahan atau transisi dari kawasan agraris pertanian dan perikanan menjadi kawasan industri.

2. Permasalahan Penelitian

Dengan keragaman latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya dan adat istiadat warga masyarakatnya, maka Kabupaten Bekasi tentunya memiliki keragaman pula dalam potensi positif berupa modal sosial yang belum dimanfaatkan secara optimal guna menyelesaikan sengketa dalam bidang penanaman modal. Dari permasalahan tersebut maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah karakteristik modal sosial masyarakat yang berkembang di Kabupaten Bekasi?
- b. Bagaimanakah upaya pemanfaatan modal sosial dalam pencegahan dan penyelesaian penyelesaian konflik agar tercipta iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi?

B. KERANGKA TEORITIS

1. Konsep dan Parameter Modal Sosial

Keberadaan modal sosial dalam proses pembangunan dewasa ini mulai diperhitungkan, di samping telah dikenal sebelumnya modal finansial dan modal manusia, karena memiliki peran yang sangat besar yaitu sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu negara. Modal sosial memiliki jangkauan yang sangat luas, bukan saja merupakan domain masyarakat sipil (*civil society*) di mana inisiatif lokal, organisasi sosial, lembaga non pemerintah

dan gerakan-gerakan partisipasi lokal lainnya beraktivitas melainkan juga dapat dibangun dan dikembangkan kualitasnya melalui instrumen hukum, kebijakan dan program-program pemerintah sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh (Edi Suharto, tanpa tahun).

Menurut J. Coleman, modal sosial atau *social capital* dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Burt R.S memberikan definisi modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu dengan lainnya dan selanjutnya membentuk kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi tetapi juga dalam setiap aspek eksistensi sosial lainnya. Francis Fukuyama memberikan pengertian tentang modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai, atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerja sama diantara mereka. Sedangkan Solow mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi guna menghasilkan kontribusi terhadap keberlanjutan produktivitas. Cohen dan Prusak lebih melihat modal sosial dari aspek daya pengikat secara internal para anggota masyarakat karena adanya faktor kepercayaan (*trust*), saling pengertian sesama anggota (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) sehingga sangat mungkin untuk dilakukannya aksi bersama secara efektif dan efisien (Agus Supriyono, dkk, tanpa tahun). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum modal sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota masyarakat (bangsa) secara bersama-sama (Agus Supriyono, dkk). Modal sosial juga diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun pengukuran terhadap modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri, tetapi hanya melihat dari hasil interaksi tersebut seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Suatu interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi ketika relasi yang kuat antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat terjadi pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerja sama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dan keinginan pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama. Interaksi-interaksi inilah yang kemudian tersusun menjadi modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan. Ditengarai bahwa suatu masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya pada

masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, munculnya ikatan *in group* dan yang lain adalah *out group* serta tidak adanya keteraturan sosial dan kepastian hukum (Edi Suharto, tanpa tahun).

Namun Fukuyama dalam Agus Supriyono menegaskan bahwa dalam dimensi modal sosial norma-norma, nilai-nilai bersama yang dijadikan acuan bersikap dan bertindak serta bertingkah laku itu belum tentu serta merta menjadi modal sosial. Hanya nilai-nilai dan norma-norma bersama yang lahir atas dasar rasa kepercayaan (*trust*) karena dalam *trust* terdapat harapan-harapan adanya keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif dalam komunitas Modal sosial memiliki sifat tidak habis bila dipakai terus menerus, justeru semakin bertambah kuat. Modal sosial akan rusak dan melemah bila jarang digunakan. Hal inilah yang membedakannya dengan finansial atau modal manusia. Berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang menghasilkan kepercayaan tersebut pada gilirannya nanti akan menghasilkan nilai ekonomi yang besar dan terukur (Edi Suharto, tanpa tahun).

Edy Suharto, merujuk pada pendapat Ridell (1997) dan R.D Putnam (*Bowling Alone: Americas Declining Social Capital, Journal of Democracy, Vol. 6, 1995*), bahwa ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*). Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh dan akhirnya modal sosial akan melahirkan tata kehidupan yang harmonis.

Dalam pembangunan Hukum Nasional tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah perkembangan tatanan yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembentukan suatu tatanan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, budaya dan berbagai faktor lainnya. Kenyataan sekarang ini, wajah hukum Indonesia memang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Di samping keberadaan tatanan hukum asli masyarakat Indonesia yang hidup dan berkembang sejak dulu kala yang kita jadikan asas dalam hukum nasional, tetapi tidak dapat dipungkiri bila tercermin pula pengaruh tatanan hukum Negara-negara maju di dunia ini dalam rangka memenuhi tuntutan globalisasi. Secara konkret saat ini Sistem Hukum Indonesia belum tampak jelas wajahnya seperti kehilangan orientasi dalam upaya pengembangannya sehingga dalam kenyataannya tampak sebagai sosok sistem hukum campuran yang serba tanggung (Wisnubroto, 2010).

C. METODE PENELITIAN

Secara umum jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan secara khusus penelitian ini menggunakan gabungan antara metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum empiris atau non doktrinal. (Wignyosubroto dalam Sulistyorini I dan Shidarta, 2011). Data yang digunakan berupa data sekunder dan primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*). Responden atau informan dipilih dengan menggunakan *purposive sampling dan snowball sampling* untuk mendapatkan informasi yang akurat, dengan mempertimbangkan kriteria

seperti kedudukan atau jabatan dalam struktur kelembagaan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan *teknik purposive sampling* dengan memperhatikan kondisi-kondisi spesifik antara lain kondisi fisik (daerah urban, rural (perkotaan) dan daerah pesisir; kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kekerabatan. Lokasi penelitian di 3 (tiga) desa di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Bekasi, yaitu: 1) Kecamatan Cikarang Utara (kawasan industri); 2) Kecamatan Muara Gembong (kawasan pesisir); 3) Kecamatan Cikarang Selatan (kawasan transisi agraris - industri).

D. PEMBAHASAN

Karakteristik Modal Sosial Masyarakat Kabupaten Bekasi

1. Kecamatan Cikarang Utara

a. Kondisi Geografis, Ekonomi dan Sosial Budaya

Hampir seluruh wilayah Kecamatan Cikarang Utara merupakan kawasan pemukiman dan industri. Seperti halnya wilayah Desa Karang Asih memang diperuntukkan bagi pemukiman penduduk. Sedangkan kawasan untuk industri ada di Desa Tanjungsari dan Desa Karang Raharja. Namun demikian ditemukan ada beberapa industri/pabrik di tengah-tengah pemukiman, seperti halnya pabrik pengolahan bahan kimia di Desa Karang Asih. Jumlah penduduk di Kecamatan Cikarang Utara adalah 240.997 orang yang terdiri dari 126.877 orang pria dan 114.120 orang wanita dengan 71.490 KK. Salah satu yang desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Karang Asih yaitu 31.987 orang. Sebagian besar penduduk Desa Karang Asih adalah pendatang, yang sebagian besar berasal dari kota-kota lain di Jawa dan sebagian kecil berasal dari luar Jawa. Karena sebagian besar adalah penduduk pendatang maka sulit sekali mengidentifikasi budaya masyarakat aslinya. Warga pendatang ini sebagian besar bekerja sebagai buruh atau pekerja di pabrik-pabrik sekitar kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Selain pekerja pabrik, ada pedagang/pemilik warung/toko kelontong atau rumah makan dan sebagian kecil pegawai negeri sipil dan TNI.

Wilayah Desa Tanjungsari sebagian besar adalah area tanah tegalan yang kering dan keras. Sebagian penduduk menggunakan area tersebut untuk berkebun dan bahan dasar pembuatan bata merah. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengemudi. Mengingat rata-rata latar belakang pendidikan penduduknya yang masih rendah (tamatan SD dan SMP) sehingga sulit untuk dapat bersaing di sektor formal. Keterbatasan biaya dan kesulitan hidup memaksa remaja tamatan SD harus berhenti sekolah. Pihak aparat Desa telah berusaha untuk mendapatkan dana sekedar meringankan biaya sekolah, kemudahan pengurusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi keluarga miskin yang akan berobat ke Puskesmas terdekat. Pihak Desa juga memberikan bantuan beras bagi keluarga miskin dan warga lanjut usia sekedar untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja. Desa Karang Raharja merupakan salah satu desa di Kecamatan Cikarang Utara yang wilayahnya sebagian besar untuk pemukiman dan industri. Sebagian besar penduduknya (>80%) adalah penduduk asli. Penduduk asli Bekasi mendiami wilayah-wilayah perkampungan dan adapun warga pendatang sebagian besar bertempat tinggal

di perumahan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh atau pegawai selebihnya adalah wiraswasta ataupun bekerja di sektor informal. Faktor rendahnya pendidikan merupakan masalah utama bagi warga ketika akan memasuki dunia kerja formal.

b. Ketersediaan Fasilitas Umum dalam Komunitas

Bangunan sekolah tersedia dari tingkat TK hingga perguruan tinggi (akademi), termasuk sekolah kejuruan dan pondok pesantren. Puskesmas ada 2 buah dan 1 rumah sakit yang relative lengkap dengan layanan dokter dan bidan. Sarana Air Bersih telah dilayani oleh PDAM dan penggunaan sumber air tanah dengan pompa listrik. Jaringan listrik dan jalur transportasi sangat memadai. Begitu juga institusi layanan komersial (pasar, bank, tempat hiburan) dan pemerintahan serta tempat ibadah sudah tersedia dengan cukup memadai.

c. Relasi Antar Warga

Di wilayah pemukiman yang padat seperti di Desa Karang Asih relasi sosial antar warga dalam keseharian terjalin dengan baik. Semua warga dari berbagai daerah asal berbaaur tanpa ada sekat-sekat perbedaan kultural yang berarti. Relasi sosial yang bersifat keagamaan biasanya terjalin dalam kegiatan pengajian-pengajian di kalangan ibu-ibu di majelis ta'lim. Kegiatan Posyandu dan arisan PKK yang diadakan oleh RT atau RW merupakan sarana bertukar informasi tentang upaya-upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan anak. Organisasi yang secara formal berada di bawah Desa adalah Karang Taruna dan PKK. Namun demikian keberadaan organisasi kepemudaan di bawah bendera partai di luar struktur desa sehingga pembinaannya di luar tanggung jawab desa. Di kalangan kelompok masyarakat juga ada organisasi/paguyuban yang bersifat kedaerahan atau kelompok pengusaha bidang tertentu (seperti kuliner dan industri kerajinan) pihak Desa melihat sebagai suatu hal yang positif untuk membangun kesatuan dan rasa kebersamaan serta membangun potensi ekonomi warga. Bila ada konflik antar warga maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak yang berkonflik. Penyelesaian melalui jalur hukum sebaiknya dijadikan pilihan terakhir dan kalau memang para pihak tidak dapat didamaikan.

d. Aksi Kolektif dan Solidaritas

Aksi kolektif dilakukan oleh warga dalam bentuk seperti pembangunan/perbaikan jalan, kantor desa atau fasilitas umum lainnya. Istilah yang lazim digunakan oleh warga adalah kerja bakti. Aksi kolektif ini ada yang secara rutin dilaksanakan dengan koordinasi dari para ketua RT/RW ada juga yang sifatnya insidental. Para partisipan tidak diberikan bayaran hanya mereka mendapatkan makanan dan minuman yang disediakan oleh warga lainnya. Sikap gotong royong yang menunjukkan rasa solidaritas itu tampak juga dalam kegiatan Posyandu. Setiap keluarga memberikan iuran sebesar Rp 1000,- yang akan digunakan bersama dalam kegiatan Posyandu di tingkat RT/RW bila ada penimbangan bayi dan balita, imunisasi, pemberian vitamin A untuk balita serta program peningkatan gizi.

Dalam rangka mempermudah akses warga dalam bidang pendidikan, sesuai dengan program pendidikan nasional maka semua warga yang sudah berusia minimal 6 atau 7 tahun terkena kewajiban bersekolah. Pendidikan sekolah dasar telah membebaskan setiap murid dari iuran/biaya sekolah. Namun berdasarkan informasi dari staf Desa Tanjung Sari, (Kepala) Desa memberikan bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beberapa desa menginginkan dapat memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar desa. Namun sampai saat ini terkendala kewenangan dan mekanisme penyalangannya.

e. Tata Kelola Komunitas dan Pengambil Keputusan

Dalam pengelolaan komunitas di lingkup desa secara formal di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh stafnya. Program kerja desa secara berjenjang diusulkan setiap tahunnya oleh Kepala Desa kepada Camat untuk digabungkan dengan desa-desa lainnya yang ada di wilayah administrasi kecamatan terkait. Selanjutnya usulan program kerja yang telah disertai dengan anggaran biaya tersebut disampaikan kepada Bupati. Usulan dari desa awalnya memang merupakan program kegiatan untuk lingkup kabupaten yang kemudian diturunkan ke kecamatan dan desa. Pelaksanaannya sangat tergantung pada kesesuaian program dan ketersediaan anggaran. Dalam pelaksanaan suatu program (biasanya memang program dari kabupaten) desa akan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tidak semua usulan program/kegiatan dari desa disetujui. Alasan tidak disetujuinya suatu kegiatan dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti adanya persyaratan administrasi yang kurang, anggaran dan adanya program yang lebih diutamakan. (Wawancara dengan Staf Kantor Desa Tanjung Sari, 4 Oktober 2013).

Peranan organisasi formal seperti partai maupun organisasi kepemudaan yang memiliki afiliasi dengan partai tertentu dalam pengelolaan komunitas tidak signifikan. Mengingat warga sudah mencitrakan bahwa organisasi yang berbasis kepartaian itu biasanya akan memaparkan kegiatan sosial kepada warga bila menjelang Pemilu saja (Wawancara dengan Bpk Sarjan, Desa Karang Raharja, 5 Oktober 2013). Nama organisasi PNPM Mandiri ternyata sangat dikenal oleh masyarakat terkait dengan perannya membantu warga (di semua lokasi penelitian) dalam perbaikan sarana jalan.

f. Pengelolaan Potensi Ekonomi Warga/Komunitas

Desa Karang Asih merupakan kawasan pemukiman paling padat di Kecamatan Cikarang Utara. Aktivitas perekonomian juga sangat hidup. Warga yang didominasi warga pendatang (menetap) maupun pendatang yang tinggal sementara dikenal sebagai warga yang memiliki etos kerja yang lebih gigih dibandingkan dengan warga asli. Hal ini disebabkan karena tuntutan hidup yang lebih tinggi untuk memperbaiki kualitas hidup. Namun tidak ada persaingan yang memicu terjadinya konflik dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Pihak desa memberikan fasilitas berupa bantuan pemasaran produk melalui kegiatan pameran-pameran setiap ada acara desa.

Industri kecil kelas industri rumah tangga banyak bermunculan. Mereka memulai dengan modal sendiri dan telah memanfaatkan jasa keuangan/perbankan bila menginginkan tambahan modal usaha. Kondisi ini sangat berbeda dengan temuan yang ada di Desa Tanjungsari dan Desa Karang Raharja. Di kedua desa ini aktivitas perekonomian tidak terlalu terlihat menonjol. Transportasi umum belum dapat menjangkau hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga berpengaruh terhadap mobilitas warga. Beberapa industri/pabrik mulai berdiri, namun belum dapat menyerap tenaga kerja setempat mengingat keterbatasan pendidikan warga. Staf kantor Desa sudah mengupayakan adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan pihak perusahaan namun dalam kenyataannya pihak perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja dari luar desa yang memang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Dengan demikian keberadaan pabrik-pabrik di sekitar desa mereka belum bisa membawa manfaat bagi penyerapan tenaga kerja. Warga kembali menekuni pekerjaan sebagai pekerja sebagai pembuat bata merah yang akhir-akhir ini semakin berkurang jumlah karena lahannya telah dijual kepada pihak lain. Hal ini membuat pihak staf kantor desa memfasilitasi warganya untuk dapat bekerja di pabrik-pabrik di desa lain dengan kondisi apa adanya (tanpa ijazah) (Wawancara dengan Staf Kantor Desa, Desa Tanjung Sari, 4 Oktober 2013). Di desa Karang Raharja, persoalan yang mendasar adalah kesiapan warga ketika harus beralih profesi. Area sawah/kebun yang dimiliki atau sebelumnya menjadi tempat mencari nafkah, sekarang telah dialihkan dan berubah menjadi bangunan perumahan atau pabrik.

2. Kecamatan Cikarang Selatan

a. Kondisi Geografis, Ekonomi dan Sosial Budaya.

Wilayah Kecamatan Cikarang Selatan merupakan perpaduan antara tanah dataran yang landai di sebelah utara dan ke selatan sebagian kontur tanahnya berbukit-bukit. Sebelumnya sebagian besar wilayah Cikarang Selatan adalah area pertanian atau persawahan. Namun dalam dua tahun terakhir ini sedikit demi sedikit area tersebut mulai kosong tidak ditanami lagi karena memang pemiliknya sudah mengalihkan tanahnya ke pihak lain untuk nantinya akan di bangun pabrik-pabrik (Wawancara dengan Ust Sholeh dan Ibu Elly, Desa Sukasejati, 12 Oktober 2013). Kecamatan Cikarang Selatan memiliki jumlah penduduk 155.845 orang yang terdiri dari 80.868 orang pria dan 74.977 orang wanita dengan 50.384 Kepala Keluarga (Data BPS Kab. Bekasi, 2010). Latar belakang sosial budaya warganya beragam. Sebagian pendatang berasal dari daerah-daerah di Jawa, seperti Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian kecil penduduk berasal dari luar Jawa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari warga. Namun di Desa Ciantra, sebagian besar penduduk berbahasa Sunda. Kesenian daerah yang masih hidup adalah Topeng Betawi, Marawis, Jaipong, dan sebagainya yang dapat dinikmati oleh warga ketika ada acara-acara perkawinan/khitanan atau perayaan hari besar nasional dan keagamaan.

b. Ketersediaan Fasilitas Umum dalam Komunitas

Fasilitas bangunan sekolah hanya tersedia hingga SLTA, termasuk sekolah kejuruan dan pesantren. Di beberapa desa ternyata minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih rendah. Fasilitas air bersih masih terbatas dan bila musim kemarau sering kekeringan. Jaringan listrik telah dapat dinikmati warga termasuk jaringan telepon seluler. Fasilitas kesehatan tersedia puskesmas yang dapat diakses warga dengan jadwal kunjungan dokter yang tidak setiap hari. Pasar dan bank hanya tersedia di kota kecamatan. Saranan jalan raya sebagian besar sudah dibetul namun ketersediaan transportasi umum selama ini dilayani oleh ojek motor.

c. Relasi Antar Warga

Relasi antar warga, khususnya antara warga pendatang dan warga asli berlangsung dengan baik. Warga pendatang membaour di tengah-tengah komunitas warga asli. Warga pendatang bekerja baik di sektor formal maupun informal. Mereka juga terlibat dalam kegiatan kolektif seperti kerja bakti, pengajian, arisan RT/RW dan sebagainya. Keberadaan komunitas-komunitas yang berbasis kedaerahan dan profesi dari warga pendatang tidak dipermasalahkan oleh warga asli yang penting tidak mengganggu ketertiban umum (Wawancara dengan Bpk. Nodin, Desa Ciantra, 11 Oktober 2013) Meskipun mereka bekerja di bidang yang sama tetapi tidak dianggap sebagai pesaing yang harus dikalahkan tetapi bila memungkinkan bisa dijadikan mitra untuk kerja sama (Wawancara dengan Bpk. Zaenal Abdullah, Desa Ciantra, 11 Oktober 2013). Bila ada persoalan yang menimbulkan konflik antar warga maka masyarakat lebih menyukai untuk menyelesaikannya melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan. Sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui keterlibatan pihak kepolisian atau jalur hukum karena persoalannya akan menjadi lebih rumit.

d. Aksi Kolektif dan Solidaritas

Aksi kolektif dan solidaritas dilakukan warga dalam bentuk gotong royong memberikan lingkungan masing-masing baik dilakukan bapak-bapak, tetapi sesekali juga oleh ibu-ibu di bawah koordinasi RT/RW dan PKK. Di beberapa desa kegiatan ini juga dilakukan bila ada warga yang sedang mempunyai hajat perkawinan atau khitanan anggota keluarganya maka warga lainnya ikut membantu mempersiapkan acara tanpa dibayar. Bahkan sudah menjadi kebiasaan bila sebagian warga juga memberikan bahan makanan (seperti gula, kopi, beras) dan uang suka rela. Bila ada warga yang sakit maka warga lain bergotong royong memberikan bantuan baik itu berupa uang (saweran) atau bila harus dibawa ke rumah sakit maka dengan sukarela warga lain akan mengusahakan mobil atau motor untuk mengantar ke rumah sakit. Di Desa Sukasejati dikenal aksi kolektif yang namanya “paketan”. Paketan adalah semacam kegiatan arisan yang anggotanya adalah ibu-ibu dengan memberikan iuran berupa barang secara konsisten sesuai dengan kemampuannya bila salah satu anggotanya sedang mempunyai hajatan. Barang iuran itu dapat berupa beras, paket gula teh dan kopi, air mineral, makanan jadi, dan barang lainnya yang dibutuhkan dalam acara pesta. Ada petugas yang mencatat iuran masing-masing anggota. Kegiatan “paketan” ini sampai saat ini masih dipraktikan warga karena dianggap sangat

membantu bagi pihak yang sedang mengadakan pesta/hajatan (Wawancara dengan Ibu Elly, Desa Sukasejati, 12 Oktober 2013).

e. Tata Kelola Komunitas dan Pengambil Keputusan

Secara formal warga menyadari bahwa Kepala Desa merupakan pimpinan yang ada di wilayah desa masing-masing. Di tingkat RT/RW komunitas dikoordinir oleh Ketua RT/RW yang akan membantu warga mengelola lingkungannya. Selain itu sebagian warga juga masih mengakui keberadaan tokoh agama/ustad dan ustadzah sebagai orang yang dianggap dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama, maka Kepala Desa akan mengundang para Ketua RT/RW dan tokoh agama dan masyarakat serta komponen-komponen lainnya seperti pihak Kepolisian untuk membahas persoalan tersebut.

Warga sudah sangat mengenal organisasi masyarakat/LSM yang ada di lingkungannya. Ada organisasi yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah seperti PNPM Mandiri, namun ada juga yang menawarkan bantuan atau memberikan advokasi atas persoalan lingkungan hidup. Warga dapat menyampaikan keluhan-keluhannya kepada staf kantor desa terkait dengan aktivitas pembangunan pabrik di lingkungan mereka dan pihak desa menjanjikan akan membicarakan langsung dengan pihak perusahaan. Akhir-akhir ini warga Desa Sukasejati sering terganggu dengan suara bising dari aktivitas pembangunan pabrik yang akan berdiri di lingkungannya. Warga sebelumnya telah mendapatkan sosialisasi dari pertemuan di kantor desa tentang keberadaan pabrik tersebut dan risiko-risiko yang akan dialaminya, seperti suara bising, kelangkaan air, limbah pabrik dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi dari staf desa bahwa Desa telah membuat kesepakatan tertentu dengan pihak pabrik.

f. Pengelolaan Potensi Ekonomi Warga

Kecamatan Cikarang Selatan merupakan daerah transisi perubahan dari wilayah agraris menjadi industri di masa yang akan datang. Beberapa area persawahan sudah kosong tidak ditanami karena oleh pemiliknya sudah dialihkan kepada pihak lain. Terlihat beberapa area persawahan dimanfaatkan sebagai area pembuatan batu bata. Beberapa area pembuatan bata merah kini juga tampak kosong karena telah berhenti beraktivitas. Beberapa sumber mengatakan bahwa pemilik lahan sudah menjual tanahnya kepada pengusaha untuk didirikan pabrik. Dampak dari peralihan fungsi tanah ini warga yang sebelumnya bekerja sebagai buruh sawah atau buruh bata merah sekarang menganggur dan secepatnya harus mencari pekerjaan lain. Beberapa warga bekerja sebagai buruh bangunan di proyek pembangunan pabrik yang ada di sekitar desanya atau menunggu nantinya akan bekerja di pabrik bila nanti siap beroperasi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga warga mulai bekerja sebagai pedagang dengan membuka warung atau berdagang keliling. Bila tidak ada modal yang cukup, maka warga memanfaatkan hadirnya kompleks perumahan dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (bagi wanita) atau sebagai petugas keamanan. Belum ada bantuan permodalan maupun pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil bagi warga.

3. Kecamatan Muara Gembong

a. Kondisi Geografis, Ekonomi dan Sosial Budaya

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Muara Gembong adalah gabungan antara tanah daratan dan perairan dengan luas keseluruhan 14.009 ha. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan terdapat aliran Sungai Citarum yang dimanfaatkan warga untuk sarana transportasi dan usaha perikanan. Jumlah penduduknya sekitar 35.600 orang dengan 8500 Kepala Keluarga membuat Kec. Muara Gembong menjadi kawasan yang paling rendah kepadatan penduduknya, yaitu hanya 254 jiwa/km persegi.

Penduduk Kec. Muara Gembong sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, baik itu nelayan budidaya ikan, nelayan perikanan tangkap maupun petani rumput laut. Saat ini sudah sulit dibedakan mana penduduk asli dan penduduk pendatang karena memang sudah berbaur. Warga pendatang berasal dari kawasan pesisir Pulau Jawa seperti dari Serang-Banten, Cirebon, Bugis dan wilayah sekitar Marunda-Jakarta.

b. Ketersediaan Fasilitas Umum dalam Komunitas

Fasilitas bangunan sekolah hanya tersedia hingga SLTA, termasuk sekolah kejuruan dan pesantren. Di beberapa desa ternyata minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih rendah. Fasilitas air bersih masih terbatas dan bila musim hujan sering banjir. Jaringan listrik telah dapat dinikmati warga termasuk jaringan telepon seluler. Fasilitas kesehatan tersedia puskesmas yang dapat diakses warga dengan jadwal kunjungan dokter yang tidak setiap hari. Pasar dan bank hanya tersedia di kota kecamatan. Saranan jalan raya sebagian besar sudah dibeton namun ketersediaan transportasi umum selama ini dilayani oleh ojek motor. Air bersih dilayani oleh PDAM namun karena pasokannya kecil maka warga banyak menggunakan air tanah untuk mandi dan cuci.

c. Relasi Antar Warga

Relasi antar warga berlangsung lebih intens di antara warga yang memiliki profesi yang sama, seperti antar nelayan. Hal ini disebabkan mereka memiliki kesamaan aktivitas di lokasi yang sama juga dengan pedagang yang memasok kebutuhan nelayan. Hal ini juga disebabkan karena jarak antara rumah yang satu dengan yang lain relatif berjauhan. Salah satu desa yang memiliki warga nelayan paling banyak adalah desa Pantai Mekar. Dalam komunitas nelayan, warga telah berhasil menyusun jaringan kelembagaan di kalangan internal untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan, dengan membentuk kelompok-kelompok usaha bersama. Kelompok ini mengatur sendiri aktivitas organisasinya dengan memanfaatkan jaringan kerja sama dengan pihak pemerintah (kantor dinas perikanan dan kelautan setempat). Warga nelayan memiliki kebiasaan menanam kembali tangkai pohon bakau yang mereka temukan di kawasan perairan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pohon bakau merupakan pohon kehidupan bagi warga. Akar bakau yang mereka tanam itu nantinya akan menjadi rumah bagi ikan dan rajungan untuk bertelur dan berkembang biak. Rajungan merupakan hasil andalan bagi masyarakat Muara Gembong.

d. Aksi Kolektif dan Solidaritas

Kerja bakti dilakukan warga ketika ada arahan dari kantor desa atau kecamatan misalnya untuk kegiatan perbaikan jalan kampung, atau ada perayaan keagamaan dan hari besar nasional seperti Agustusan. Kegiatan ini warga perlu dimotivasi sedemikian rupa agar kegiatan berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena warga (laki-laki) harus mulai bersiap dari pagi hingga siang untuk melaut pada sore atau malam harinya. Kegiatan bersama yang rutin dilakukan itu seperti pengajian (majlis taklim) yang dilakukan secara bergantian di rumah warga atau di musholla. Bantuan suka rela diberikan kepada warga yang sedang menyelenggarakan acara perkawinan/khitanan atau bila ada warga yang meninggal dunia. Warga juga bersama-sama berkontribusi menjaga keamanan perairan dari perilaku nelayan dari luar wilayah yang merugikan nelayan lokal, seperti melakukan aktivitas “garok” atau menangkap ikan menggunakan jaring yang dapat merusak lingkungan.

e. Tata Kelola Komunitas dan Pengambilan Keputusan

Rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh para Kepala Desa dan jajarannya di Kecamatan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang kondisi terkini dari aktivitas warga. Selain itu forum ini juga merupakan forum sosialisai program dan pembahasan pelaksanaan program agar sampai ke masyarakat. Dalam pelaksanaan program maka pihak Desa akan berdiskusi dengan berbagai elemen dari masyarakat seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Upaya warga untuk menjalin kerja sama dengan institusi lain pernah dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang perikanan dan perbaikan lingkungan. Namun secara organisasi masih diperlukan pemahaman kepada anggota tentang tata cara berorganisasi dengan benar (Wawancara dengan Bpk Wawan, Desa M.Gembong, 27 September 2013).

f. Pengelolaan Potensi Ekonomi Warga

Potensi perikanan dari warga Muara Gembong sangatlah besar, khususnya aneka ikan tangkap, ikan budidaya dan rumput laut. Potensi ini belum mendapat dukungan finansial dari lembaga keuangan. Hingga saat ini warga mengandalkan pinjaman modal dari para bakul ketika akan melaut. Keberadaan koperasi dirasakan belum memberikan manfaat bagi para nelayan. Inisiatif warga untuk membangun jaringan dengan institusi lain merupakan langkah maju bagi peningkatan SDM. Keberadaan jalan raya yang menghubungkan Kec. Muara Gembong dengan desa-desa lain di sekitarnya sangat penting. Saat ini jalur pengiriman hasil laut hanya menggunakan jalur laut. Apabila jalur darat diperbaiki maka potensi ekonomi warga akan dapat dikembangkan dan aktivitas perdagangan akan lebih ramai.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik modal sosial yang berkembang di Kabupaten Bekasi mengarah kepada karakteristik atau tipologi dari Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*). Hal ini terlihat dalam beberapa ciri antara lain (Alfitri, 2011): 1) Adanya prinsip persamaan yang anut oleh komunitas/warga bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran

sosialnya, termasuk dalam aktivitas ekonominya. Prinsip ini terlihat bahwa setiap warga berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi desa dan sebagainya dengan tingkatan kualitas yang beragam tergantung kepada kondisi wilayah masing-masing; 2) Adanya prinsip kebebasan, di mana setiap warga berhak untuk menyampaikan ide dan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang mewakilinya. Masyarakat memberikan kebebasan untuk mengembangkan idenya dalam bentuk aktivitas-aktivitas kreatif baik yang bersifat individual maupun kolektif. Hal ini terlihat dalam pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan nelayan di Kec. Muara Gembong dan kelompok “paketan” di kalangan ibi-ibu di Kec. Cikarang Selatan. Kelompok-kelompok ini terbentuk oleh adanya rasa saling percaya sesama anggota bahwa mereka akan mentaati kesepakatan yang telah dibuat dengan sukarela; 3) Adanya prinsip kemajemukan dan humanitarian, yang tampak pada latar belakang suku dan budaya warga dalam komunitas yang beragam. Namun dalam relasi antar warga tidak terkotak-kotak berdasarkan ikatan primordial melainkan menunjukkan relasi yang menghargai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Rasa kemanusiaan antar warga ditunjukkan dalam bentuk aksi-aksi solidaritas untuk membantu anggota masyarakat lain yang membutuhkan pertolongan atau untuk memenuhi kebutuhan bersama. Bentuk Modal Social yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*) ini biasanya akan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat (Alfitri, 2011).

Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan sosial sehari-hari tidak dapat terlepas dari adanya perselisihan antar warga masyarakat, baik itu berbentuk keluhan, konflik maupun sengketa yang diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antar anggota masyarakat itu sendiri. Adapun pengelolaan perselisihan tersebut tentunya berbeda tergantung pada karakteristik masyarakatnya. Semakin kompleks kehidupan masyarakatnya maka semakin rumit penyelesaian perselisihannya (Saptomo, 2010). Ada 2 (dua) mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat dipilih, yaitu penyelesaian sesuai dengan mekanisme hukum (litigasi) atau masyarakat dapat memilih mekanisme yang kedua, yaitu penyelesaian konflik berdasarkan potensi lokal. Penyelesaian model kedua ini ternyata dapat diterapkan baik dalam jenis masyarakat yang *guyub* (*gemeinschaft*) maupun dalam masyarakat *gessellschaft*, karena dianggap relatif efisien dan memuaskan para pihak (Saptomo, 2010). Penyelesaian konflik berdasarkan potensi lokal ini artinya konflik diselesaikan menurut budaya masyarakat setempat, termasuk di dalamnya adalah tata nilai, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, dijelaskan dalam Pasal 1.2 bahwa penanganan konflik (sosial) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Dalam penelitian ditemukan potensi konflik maupun konflik yang pernah terjadi adalah konflik yang terkait dengan akses warga terhadap kegiatan ekonomi yang merasa dibatasi oleh persyaratan formal yang tidak dapat dipenuhi dan pemanfaatan potensi ekonomi

daerah yang tidak merata, seperti hak warga untuk menikmati dana CSR dari perusahaan yang didirikan di wilayahnya. Penanganan konflik ini antara lain bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum.

Pencegahan konflik merupakan langkah awal yang harus dilakukan tidak hanya oleh aparat pemerintah tetapi juga oleh peran serta masyarakat dengan cara: a) memelihara kondisi damai, yang dilakukan dengan mengembangkan potensi modal sosial yang dimiliki warga seperti penghargaan warga atas adanya perbedaan diantara mereka, menjaga sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ajaran agamanya, dan mengakui persamaan hak dan kewajiban. b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c) meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini ini merupakan kewajiban dari pemerintah agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, melestarikan Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal dan membangun sinergi yang harmonis dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik modal sosial yang berkembang di Kabupaten Bekasi mengarah kepada karakteristik atau tipologi dari Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*). Hal ini terlihat dalam beberapa ciri antara lain:
 - a. Adanya prinsip persamaan yang anut oleh komunitas/warga bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran sosialnya, termasuk dalam aktivitas ekonominya. Prinsip ini terlihat bahwa setiap warga berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi desa dan sebagainya dengan tingkatan kualitas yang beragam tergantung kepada kondisi wilayah masing-masing
 - b. Adanya prinsip kebebasan, di mana setiap warga berhak untuk menyampaikan ide dan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang mewakilinya. Masyarakat memberikan kebebasan untuk mengembangkan idenya dalam bentuk aktivitas-aktivitas kreatif baik yang bersifat individual maupun kolektif. Hal ini terlihat dalam pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan nelayan di Kec. Muara Gembong dan kelompok “paketan” di kalangan ibi-ibu di Kec. Cikarang Selatan. Kelompok-kelompok ini terbentuk oleh adanya rasa saling percaya sesama anggota bahwa mereka akan mentaati kesepakatan yang telah dibuat dengan sukarela.

- c. Adanya prinsip kemajemukan dan humanitarian, yang tampak pada latar belakang suku dan budaya warga dalam komunitas yang beragam. Namun dalam relasi antar warga tidak terkotak-kotak berdasarkan ikatan primordial melainkan menunjukkan relasi yang menghargai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Rasa kemanusiaan antar warga ditunjukkan dalam bentuk aksi-aksi solidaritas untuk membantu anggota masyarakat lain yang membutuhkan pertolongan atau untuk memenuhi kebutuhan bersama.
2. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat dapat dioptimalkan dalam penyelesaian konflik sudah dapat dimulai dari upaya pencegahan terjadinya konflik melalui upaya penciptaan kondisi yang damai, aman dan tenteram dalam masyarakat dengan melakukan stimulasi terhadap unsur-unsur modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Merupakan tugas pemerintah dan warga masyarakat untuk mengembangkan ide untuk menjalin kemitraan antara warga, pemerintah dan pelaku usaha setempat, selain untuk menjaga stabilitas keamanan dalam berusaha tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfisari, 2008. "Analisa Model Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin di Keluarga Miskin di Kelurahan Jaya – Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor (Laporan Penelitian)".
- Alfitri, 2011. "Community Development: Teori dan Aplikasi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ambara, I Gede Adi, Pudjihardjo dan Asfi Manzilati, 2010. "Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Adat/Pakraman (Studi Kasus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Tibubiyu, kabupaten Tabanan, Bali)" (Laporan Penelitian).
- Darwanto, Harry. 2003. "Prinsip-prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah". www.bapennas.go.id. Diakses 6 Maret 2012
- Edi Suharto, tanpa tahun. "Modal Sosial dan Kebijakan Publik" (Artikel), www.bapennas.go.id. diakses 1 Maret 2012.
- Harjonno,DK. 2007. "Hukum Penanaman Modal". Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sptomomo, Ade. 2010. "Hukum dan Kearifan Lokal". Jakarta: Grasindo.
- Sembiring, Sri Alem dan Lister Berutu. 2004. "Modal Sosial Dalam Komunitas Kuta Etnis Karo dan Relevansinya Dengan Otonomi Daerah" (Laporan Penelitian).
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, "Ragam-ragam Penelitian Hukum" dalam buku "Metode Penelitian Hukum: Refleksi dan Konstelasi", Editor:Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia\



Supancana, IBR. 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Suradi, 2006, "Peran kapital Sosial dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Sulawesi Tengah)". Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.11, No.2.

Wisnubroto, A. 2010. Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.